

STATISTIK PENDIDIKAN PROVINSI BALI 2011



TINGKATKAN KEBERAKSARAAN
TINGKATKAN KEBERAKSARAAN



*BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI*

STATISTIK PENDIDIKAN PROVINSI BALI TAHUN 2011

ISBN : 979 473 987 1
Nomor Publikasi : 51520.1201
Katalog BPS : 4301002.51
Ukuran Buku : 21 x 28 cm
Jumlah Halaman : 58 Halaman.

Naskah:
Bidang Statistik Sosial

Penyunting:
Bidang Statistik Sosial

Pengolah Data:
Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit:
Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan Oleh:
Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

<http://bali.bps.go.id>

Editor : Indra Susilo. DP.Sc., MM.

Penulis : A. A. GD. Dirga Kardita, SST
Drs. IG. B. Asti Legawa

Pengolah Data : Mulyani Puji Lestari. SST.

PENGANTAR

Publikasi Statistik Pendidikan Provinsi Bali Tahun 2011 ini merupakan kelanjutan penerbitan sebelumnya yang disusun setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Publikasi ini menyajikan data yang dikumpulkan langsung oleh BPS (Data Primer), dengan maksud untuk memberikan gambaran kondisi Pendidikan di Bali secara umum.

Publikasi ini menyajikan informasi dasar yang meliputi enam bagian, yaitu angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi murni (APM), angka partisipasikasar (APK), angka melek huruf, penduduk yang tidak bersekolah lagi, dan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Mengingat luasnya cakupan pengertian pendidikan dan terbatasnya data yang tersedia, maka publikasi ini disusun dalam bentuk makro berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terbitnya publikasi ini disampaikan ucapan terima kasih. Saran dan kritik yang konstruktif sangat kami hargai untuk perbaikan publikasi yang akan datang, SEJAHTERA BUAT KITA SEMUA.

Denpasar, Juli 2012
Kepala BPS Provinsi Bali,

Ir. I Gde Suarsa, M. Si,
NIP. 1955 0628 197903 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v-vii
BAB 1. Pendahuluan.	1
1.1. Latar Belakang.	1
1.2. Tujuan.	3
1.3. Sumber Data.	3
1.4. Sistematika Penulisan.	4
BAB 2. Metodologi.	5
2.1. Ruang Lingkup.	5
2.2. Kerangka Sampel.	6
2.3. Rancangan Sampel.	6
2.4. Metode Pengumpulan Data.	7
2.5. Pengolahan Data.	7
BAB 3. Konsep Dan Definisi.	8
BAB 4. Ulasan.	11
4.1. Angka Partisipasi Sekolah.	12
4.1.1. Angka Partisipasi PAUD	13
4.1.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD, SLTP, SLTA	15
4.1.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SLTP, SLTA	20
4.1.4. Angka Partisipasi Murni (APM)	23
4.2. Angka Buta Huruf	26
4.3. Angka Anak Putus Sekolah.	30
4.4. Penduduk Tidak Bersekolah	32
4.4. Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan.	35
BAB 5. Penutup.	37
5.1. Kesimpulan.	37

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 : Angka Partisipasi Sekolah Kasar (APK) Penduduk Usia 0-6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2011.....	15
Tabel 2 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2011	18
Tabel 3 : Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SLTP dan SLTA, Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2011	21
Tabel 4 : Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SLTP, dan SLTA Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2011	24
Tabel 5 : Jumlah Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah, Tipe Daerah dan Jenis Kelmain, Provinsi Bali Tahun 2011	33
Tabel 6 : Persentase penduduk 7-18 Tahun Menurut Alasan Tidak Bersekolah dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2011	34

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun, 13-15 Tahun, dan 16-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2011 .	17
Gambar 2 : Perspektif Gender APK Bidang Pendidikan SD, SLTP dan SLTA, Provinsi Bali Tahun 2011	23
Gambar 3 : Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas Yang Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2011	28
Gambar 4 : Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2011	29
Gambar 5 : Persentase Penduduk Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2011	31

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 09 : Persentase Penduduk Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2010.....	35
Tabel 10 : Persentase Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2010.....	36
Tabel 11 : Persentase Penduduk Laki dan Perempuan Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2010.....	37
Tabel 12 : Persentase Penduduk Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur serta Kemampuan Membaca dan Menulis, Provinsi Bali Tahun 2010.....	38
Tabel 13 : Persentase Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur serta Kemampuan Membaca dan Menulis, Provinsi Bali Tahun 2010.....	39
Tabel 14 : Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur serta Kemampuan Membaca dan Menulis, Provinsi Bali Tahun 2010.....	40
Tabel 15 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2010	41
Tabel 16 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2010	42
Tabel 17 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2010.....	43
Tabel 18 : Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2010	44
Tabel 19 : Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2010	45

Tabel 20: Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2010.....	46
Tabel 21 : Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2010.....	47
Tabel 22 : Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2010	48
Tabel 23 : Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2010.....	49
Tabel 24 : Persentase Penduduk Laki-laki Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki, Provinsi Bali Tahun 2010.....	50
Tabel 25 : Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki, Provinsi Bali Tahun 2010.....	51
Tabel 26 : Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki, Provinsi Bali Tahun 2010.....	52
Tabel 27 : Persentase Penduduk Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, Provinsi Bali Tahun 2010	53
Tabel 28 : Persentase Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, Provinsi Bali Tahun 2010	54
Tabel 29 : Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, Provinsi Bali Tahun 2010	55
Tabel 30 : Persentase Penduduk Laki-laki Usia 4-6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Dalam Pendidikan Pra Sekolah, Provinsi Bali Tahun 2010.....	56
Tabel 31 : Persentase Penduduk Perempuan Usia 4-6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Dalam Pendidikan Pra Sekolah, Provinsi Bali Tahun 2010.....	57

Tabel 32 : Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Usia 4-6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Dalam Pendidikan Prasekolah, Provinsi Bali Tahun 2010 58

<http://bali.bps.go.id>



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia, mesti mendapat perhatian khusus dalam pembangunan. Pada umumnya semakin tinggi pendidikan suatu masyarakat, kualitas hidup mereka akan semakin meningkat. Kendalanya adalah tingginya biaya pendidikan menyebabkan masyarakat yang kurang mampu tidak dapat menikmati pendidikan yang lebih tinggi. Kendala ini menyebabkan masyarakat kurang mampu tidak dapat bersaing dengan masyarakat yang telah maju. Untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, memperluas wawasan, dan pengembangan daya nalar dan analisis, sehingga memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu.

Pada umumnya pendidikan dilakukan secara berjenjang dimulai dari jenjang pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar (meliputi SD dan SLTP atau sederajat), pendidikan menengah (meliputi SLTA dan SMK, atau sederajat), dan pendidikan tinggi (strata dan non strata).

Tidak sedikit memang kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas manusianya. Disamping sarana dan prasarana pendidikan seperti; jumlah sekolah, kuantitas serta kualitas guru, berbagai hal-hal lain yang menunjang kegiatan pendidikan sangat diperlukan sebagai satu kesatuan yang saling menunjang dan saling mengkait. Betapa sulit dan peliknya masalah yang

dihadapi, terkadang ketika satu masalah dapat diselesaikan, akan muncul lagi satu atau beberapa masalah lain. Ketimpangan pembangunan di bidang ekonomi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi berbedanya tingkat pendidikan antar penduduk di daerah perkotaan dan perdesaan, disamping kultur sosial dan budaya yang berbeda antar daerah juga masih cukup kuat memberi warna terhadap kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk laki-laki dan perempuan.

Dalam publikasi "*Statistik Pendidikan Provinsi Bali Tahun 2011*" ini disajikan data pendidikan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2011 berupa rangkuman beberapa indikator pendidikan.

Gambaran keadaan pendidikan di Provinsi Bali akan dilihat secara khusus melalui beberapa indikator penting yakni kemampuan baca tulis penduduk (Angka Melek Huruf), Tingkat Partisipasi Sekolah meliputi Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Siswa Menurut Jenjang Pendidikan dan Partisipasi Sekolah Anak Usia Pra Sekolah. Indikator indikator tersebut merupakan indikator pendidikan yang biasanya dipakai untuk mengukur hasil pembangunan bidang pendidikan, misalnya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan penghitungan Indek Pembangunan Manusia (IPM).

1.2. TUJUAN

Publikasi ini disusun untuk menyediakan data tentang keadaan kesejahteraan penduduk dilihat dari sektor pendidikan yang meliputi kemampuan baca tulis, tingkat pendidikan yang ditamatkan dan atau status pendidikan yang sedang diikuti. Secara spesifik, tujuan penyusunan publikasi ini antara lain adalah;

1. Menyediakan data statistik berupa gambaran pendidikan penduduk Provinsi Bali.
2. Menyediakan data dasar pendidikan Provinsi Bali untuk membantu pemangku kebijakan dalam mengambil berbagai kebijakan publik khususnya di bidang pendidikan.
3. Memberikan gambaran kepada Pemerintah Provinsi Bali dalam mengevaluasi pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan.

1.3. SUMBER DATA

Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2011 yang pelaksanaan lapangannya serentak diseluruh wilayah Indonesia. Untuk Provinsi Bali, sampelnya tersebar pada sembilan kabupaten/kota mencakup seluruh kecamatan baik wilayah perkotaan dan perdesaan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Publikasi ini tersusun dalam 5 (lima) bab, dilengkapi tabel-tabel lampiran dengan sistematika ;

BAB I. PENDAHULUAN, meliputi Latar Belakang, Tujuan Penulisan, Sumber Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. METODOLOGI, meliputi Ruang Lingkup, Kerangka Sampel, Rancangan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Pengolahan Data.

BAB III. KONSEP DAN DEFINISI, meliputi berbagai konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini.

BAB IV. PEMBAHASAN, meliputi Angka partisipasi Sekolah, Angka Buta Huruf, Angka Putus Sekolah, Penduduk Tidak Sekolah, dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

BAB V. PENUTUP

TABEL-TABEL LAMPIRAN



BAB II

METODOLOGI

Publikasi ini disusun berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) secara triwulanan tahun 2011. Seperti halnya publikasi tahun sebelumnya, metodologi, konsep dan definisi Susenas tetap dicantumkan untuk memberikan arah dan panduan dalam pemanfaatan data yang disajikan. Konsep dan definisi Susenas 2011 adalah sebagai berikut:

2.1. RUANG LINGKUP

Susenas 2011 dilaksanakan di seluruh wilayah geografis Indonesia dengan ukuran sampel sebesar 300.000 rumah tangga tersebar dalam daerah perkotaan maupun perdesaan. Untuk Provinsi Bali, jumlah sampelnya sebesar 5.760 rumah tangga, tersebar dalam 576 blok sensus di wilayah perkotaan dan perdesaan. Data yang dikumpulkan dalam Susenas meliputi keterangan umum anggota rumah tangga, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, fertilitas, perumahan, pengeluaran rumah tangga, dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

2.2. KERANGKA SAMPEL

Kerangka sampel yang digunakan untuk pemilihan blok sensus¹ terdiri dari 2 jenis yaitu kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus, dan kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga dalam blok sensus terpilih. Kerangka sampel blok sensus daerah perkotaan/perdesaan adalah daftar blok sensus yang terdapat di daerah perkotaan/perdesaan di setiap kabupaten/kota dari hasil sensus penduduk 2010 (SP 2010). Sedangkan kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga adalah daftar rumah tangga hasil update daftar hasil SP 2010 dengan menggunakan Daftar VSEN12.P

2.3. RANCANGAN SAMPEL

Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2011 dilaksanakan setiap triwulanan, data yang dikumpulkan triwulanan selama setahun akan digunakan untuk estimasi kabupaten/kota. Metode pengambilan sampel dua tahap dimana; *Tahap pertama*, dari kerangka sampel blok sensus dipilih sejumlah blok sensus *secara Probability Proportional to Size (PPS)³ – Linear Systematic Sampling* dengan size banyaknya rumah tangga hasil listing di setiap blok sensus hasil Sensus Penduduk

¹ Blok sensus adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja seorang petugas pencacah. Syarat blok sensus adalah harus memiliki batas-batas yang mudah dikenali, terletak dalam satu hamparan, serta setiap desa/kelurahan dibagi habis menjadi beberapa blok sensus.

³ *Proportional Probability to Size (PPS)* adalah salah satu design pengambilan sampel, dimana probabilita setiap unit sampel ditentukan oleh besarnya size unit sampel tersebut. Dalam hal ini unit sampelnya blok sensus dengan size banyaknya rumah tangga tiap blok sensus. Semakin banyak rumah tangga dalam suatu blok sensus maka probabilita terpilihnya blok sensus tersebut sebagai sampel semakin besar

2010. *Tahap kedua*, dari sejumlah rumah tangga hasil update di setiap blok sensus terpilih dipilih sebanyak 10 rumah tangga secara *Linear Systematic Sampling*⁴.

2.4. METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data setiap rumah tangga terpilih dilakukan dengan wawancara langsung antara pencacah dengan responden. Keterangan tentang rumah tangga dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lainnya yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan. Sedangkan pertanyaan yang ditujukan untuk individu diusahakan individu bersangkutan yang menjadi responden.

2.5. PENGOLAHAN DATA

Pengolahan, dilakukan mulai dari pengolahan manual meliputi pengecekan awal atas kelengkapan isian daftar pertanyaan (pemeriksaan), pengelompokan (*batching*), pemberian kode (*coding*) serta penyuntingan (*editing*) terhadap isian yang tidak wajar. Selanjutnya tahap perekaman data (*data entry*), kompilasi data, pemeriksaan konsistensi antar isian dalam kuesioner (*validation*) sampai dengan tabulasi dilakukan dengan menggunakan komputer.

⁴ *Linear Systematic Sampling* adalah metode pengambilan sampel dengan menggunakan angka kelipatan tertentu setelah unit sampel diurutkan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini unit sampelnya adalah rumah tangga (dalam satu blok sensus) yang diurutkan berdasarkan kelompok pengeluaran rumah tangga. Dimaksudkan supaya yang sampel yang terpilih meliputi semua kelompok pengeluaran.



BAB III

KONSEP DAN DEFINISI

Untuk menghindari salah pengertian dalam membaca dan memahami data maka perlu dibuat batasan kerangka berpikir sehingga diperoleh kesamaan persepsi tentang angka yang disajikan. Beberapa konsep dan definisi yang perlu diperhatikan dalam publikasi ini adalah :

Sekolah adalah sekolah formal maupun non formal mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Pendidikan prasekolah (*play group* dan taman kanak-kanak), kursus-kursus (mengetik, komputer, bahasa dan sejenisnya), kursus kedinasan (Seskoad, Diklatpim IV, III, II, Lemhanas) dan kejar paket A, B, atau C sebagai sekolah nonformal.

Seseorang dikatakan *sedang/masih bersekolah* apabila ia terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan disuatu jenjang pendidikan formal maupun non formal.

Aktif mengikuti pendidikan maksudnya bahwa ia secara fisik mengikuti pelajaran di kelas, termasuk yang tidak mengikuti pelajaran di kelas tetapi diperbolehkan mengikuti ujian.

Jenjang pendidikan dikelompokkan menjadi tiga yaitu;

1. *Jenjang pendidikan dasar* meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtida'iyah (MI) atau yang sederajat, serta Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau yang sederajat.

2. *Jenjang pendidikan menengah* meliputi Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) atau yang sederajat.
3. *Jenjang pendidikan tinggi* meliputi semua pendidikan yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan menengah, terbagi dalam dua jalur;

Program Gelar (Strata atau disebut juga Jalur Akademik) yaitu program yang menekankan pada pembentukan keahlian akademik mengenai penelitian dalam suatu bidang ilmu, teknologi atau seni yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi mencakup pendidikan sarjana muda (S0), sarjana/strata-1 (S1), strata-2 (S2) dan strata-3 (S3)

Program Non Gelar (Non Strata atau disebut juga Jalur Profesional) yaitu program yang menekankan pada pembentukan keahlian profesional, yaitu keahlian pada ketrampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni. Program ini pada umumnya adalah program pendidikan diploma, yang meliputi Diploma I (DI), Diploma II (DII), Diploma III (DIII)/setara dengan sarjana muda dan Diploma IV (DIV)/setara dengan sarjana.

Status pendidikan adalah keadaan seseorang/penduduk pada saat pencacahan, dibedakan menjadi;

1. *Tidak/belum pernah bersekolah* adalah penduduk yang tidak atau belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan.

2. *Masih bersekolah* adalah penduduk yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan disuatu jenjang pendidikan formal maupun non formal. Tidak termasuk penduduk yang mengikuti pendidikan di madrasah diniyah dan kursus-kursus.
3. *Tidak bersekolah lagi* adalah penduduk yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, tetapi pada saat pencacahan yang bersangkutan tidak lagi terdaftar dan atau tidak aktif (lagi) mengikuti pendidikan.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan seseorang yang ditandai dengan lulus ujian akhir serta mendapatkan surat tanda tamat belajar atau ijazah.

Penduduk dikatakan *mampu baca tulis* jika dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu. Orang buta yang dapat membaca huruf *braille* digolongkan dapat membaca dan menulis. Orang yang dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaliknya, dianggap tidak dapat baca tulis.



BAB IV

PEMBAHASAN

Sumber daya manusia (SDM) yang bermoral dan berkualitas sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan suatu bangsa. Pentingnya ketersediaan SDM yang bermoral dan berkualitas menjadikan pendidikan sebagai salah satu bidang pembangunan yang harus diperhatikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang memberi andil yang besar bagi kelanjutan pembangunan di masa datang, karena pendidikan dinilai sebagai pintu masuk untuk memperoleh sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif sebagai pelaksana kegiatan pembangunan. Maju tidaknya suatu bangsa terletak pada kondisi tingkat pendidikan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin baik kualitas sumber daya manusianya, dan akan semakin majulah bangsa tersebut. Pendidikan merupakan sarana untuk membentuk manusia-manusia yang terampil dan produktif, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan diantaranya mengembangkan akses terhadap pendidikan anak usia dini, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, memperbaiki kurikulum serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik, 20 persen anggaran pendidikan

dan bahkan sejak tahun 1994 pemerintah juga melaksanakan program wajib belajar 9 tahun.

Kondisi pembangunan pendidikan dapat diketahui melalui beberapa indikator pendidikan. Indikator pendidikan dibagi menjadi tiga macam yaitu indikator input, indikator proses, dan indikator output. Indikator input merupakan informasi atau keterangan dasar dan penunjang yang diperlukan dalam perencanaan program pendidikan. Salah satu indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator input adalah rasio murid-guru. Indikator proses merupakan keadaan proses pendidikan atau bagaimana program pendidikan yang diimplementasikan terjadi di masyarakat. Indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator proses antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator output merupakan hasil-hasil yang dicapai oleh masyarakat setelah melalui proses pendidikan. Indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator output antara lain angka melek huruf, angka buta huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan angka putus sekolah.

4.1. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH.

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat menunjukkan perbandingan penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu terhadap total penduduk pada umur tersebut. APS dapat menjadi salah satu indikator yang menggambarkan kesempatan penduduk untuk memperoleh pendidikan.

Penghitungan APS tingkat pendidikan SD, SLTP, dan SLTA, Umur penduduk dibagi ke dalam tiga kelompok dimana Kelompok pertama umur 7-12 tahun untuk tingkat pendidikan SD, kelompok kedua umur 13-15 tahun untuk tingkat pendidikan SLTP, dan kelompok ketiga umur 16-18 tahun untuk tingkat pendidikan SLTA. Kajian tentang Angka Partisipasi Prasekolah/Sekolah digambarkan dalam ulasan berikut :

4.1.1. Partisipasi Siswa pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kajian tentang pendidikan anak usia dini (0-6 tahun) akhir-akhir ini semakin dirasa penting. Pakar pendidikan mengatakan bahwa anak-anak sebelum memasuki bangku sekolah dasar (SD) sebaiknya diberikan sejenis kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran bersosialisasi dengan lingkungan luar keluarga/rumah tangga. Proses pembelajaran tersebut antara lain dengan mendidik anak tersebut di lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini seperti Taman Kanak-Kanak (TK). Tujuan dari pendidikan ini adalah memberikan stimulus/rangsangan bagi anak-anak usia dini sebelum mereka memasuki pendidikan, diyakini dengan demikian akan membuat seorang anak mampu beradaptasi dan makin cerdas, karena dalam kegiatan tersebut ada rangsangan untuk mengembangkan saraf-saraf motorik mereka. Kegiatan pra sekolah meliputi pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), RA, BA, Kelompok Bermain, dan Tempat Penitipan Anak yang mempunyai program pengembangan anak. Bila syarat-syarat motorik ini telah dirangsang dengan berbagai jenis permainan maka dia akan tumbuh dan berkembang menjadi jutaan sel motorik yang akan menjadi cikal bakal dari kecerdasan anak di masa yang akan datang. Ketika anak

memasuki pendidikan usia dini, yang harus dilatih adalah bagaimana cara bermain yang benar, bernyanyi dan berkreasi sesuai dengan kekuatan fisik anak. Jadi ketika anak memasuki dunia pendidikan usia dini (setingkat taman kanak-kanak, *play group*, kelompok bermain, tempat penitipan anak/TPA) maka anak bukanlah harus belajar membaca, menulis apalagi berhitung (Hilary Clinton - 1998).

Hasil pengolahan data Susenas tahun 2011, menunjukkan bahwa rata-rata angka partisipasi PAUD di Provinsi Bali mencapai 43,20 persen. Angka ini masih cukup rendah, dibandingkan angka keberhasilan yang dicapai oleh Kabupaten Tabanan, Badung, Klungkung, dan Kota Denpasar yang sudah mencapai angka diatas 50 persen. Disisi lain masih terdapat beberapa kabupaten di Bali yang memiliki angka partisipasi PAUD dibawah angka rata-rata Provinsi Bali yaitu Kabupaten Jembrana (39,44), Kabupaten Gianyar (40,15), Kabupaten Bangli (29,03), Kabupaten Karangasem (29,08), dan Kabupaten Buleleng (30,83). Dilihat dari sudut pandang gender, angka partisipasi PAUD di Bali relatif tidak jauh berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 1: Persentase Penduduk Usia 4-6 Tahun Menurut kabupaten/Kota dan Partisipasi Sekolah, Provinsi Bali 2011

Kabupaten/Kota	Partisipasi Prasekolah					
	Ya, pernah/sedang			Tidak pernah		
	Laki	Prp	Jml	Laki	Prp	Jml
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Jembrana	33,58	49,64	39,44	66,42	50,36	60,56
2. Tabanan	48,06	56,04	51,65	51,94	43,96	48,35
3. Badung	65,24	49,65	58,05	34,76	50,35	41,95
4. Gianyar	38,08	42,56	40,15	61,92	57,44	59,85
5. Klungkung	61,40	41,79	51,76	38,60	58,21	48,24
6. Bangli	28,62	29,43	29,03	71,38	70,57	70,97
7. Karangasem	28,03	30,25	29,08	71,97	69,75	70,92
8. Buleleng	33,22	28,35	30,83	66,78	71,65	69,17
9. Denpasar	54,13	47,82	51,08	45,87	52,18	48,92
BALI	44,56	41,66	43,20	55,44	58,34	56,80

Sumber : BPS, Susenas 2011

4.1.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD, SLTP, dan SLTA

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan antara penduduk usia sekolah yang masih bersekolah dengan penduduk usia sekolah. Penghitungan APS biasanya dikelompokkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan SD (7-12 tahun), SLTP (13-15 tahun) dan SLTA (16-18 tahun). Secara matematis APS dapat dihitung dengan formulasi berikut :

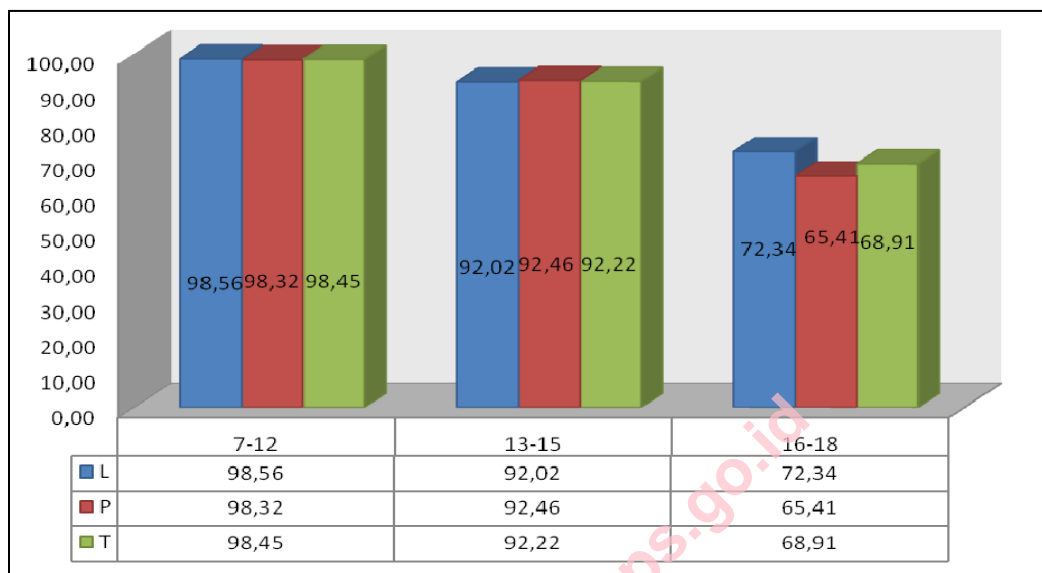
$$\text{APS SD} = \left[\frac{\text{Jumlah Penduduk 7-12 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun}} \right] \times 100 \%$$

$$\text{APS SLTP} = \left[\frac{\text{Jumlah Penduduk 13-15 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun}} \right] \times 100 \%$$

$$\text{APS SLTA} = \left[\frac{\text{Jumlah Penduduk 16-18 Tahun yang Masih Sekolah}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun}} \right] \times 100 \%$$

Dengan melakukan pengolahan data dari hasil pendataan Susenas 2011 dan menggunakan formulasi diatas diperoleh hasil sebagai berikut:

Gambar 1 : Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun Menurut Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2011



Sumber : BPS, Susenas 2011.

Pada Gambar di atas terlihat bahwa APS penduduk laki-laki pada usia 13-15 tahun lebih rendah dibandingkan APS perempuan pada usia tersebut, disisi lain APS pada usia 16-18 tahun menunjukkan APS laki-laki cenderung lebih tinggi dari APS perempuan. APS pada usia 13-15 tahun dan usia 16-18 tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dimana APS pada usia 13-15 tahun di tahun 2010 tercatat sebesar 89,26 persen dan di tahun 2011 naik menjadi 92,22 persen, begitu juga dengan APS usia 16-18 tahun dimana pada tahun 2010 tercatat sebesar 65,22 persen dan di tahun 2011 naik menjadi 68,91 persen.

Mengkaji lebih dalam tentang APS, Tabel 2 dibawah menyajikan angka partisipasi sekolah (APS) menurut kelompok usia sekolah 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang terjadi di kabupaten/kota se-Bali.

Tabel 2 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2011.

Kabupaten/Kota	APS 7 - 12 th			APS 13 - 15 th			APS 16 - 18 th		
	L	P	T	L	P	T	L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Jembrana	98,39	98,78	98,59	91,67	91,44	91,57	57,97	52,59	55,06
2. Tabanan	100,00	97,42	98,81	91,07	87,99	89,45	59,75	60,01	59,88
3. Badung	99,25	98,92	99,08	97,93	92,97	95,44	86,43	73,34	80,65
4. Gianyar	98,95	99,19	99,06	94,49	98,23	96,21	80,06	84,47	82,46
5. Klungkung	99,28	98,92	99,13	100,00	94,32	97,21	76,55	73,39	75,07
6. Bangli	97,73	98,25	97,99	87,76	89,23	88,34	63,60	43,00	55,16
7. Karangasem	94,67	93,58	94,17	90,28	90,75	90,53	73,05	59,75	66,62
8. Buleleng	98,08	98,67	98,34	85,59	89,58	87,45	67,04	64,06	65,60
9. Denpasar	100,00	100,00	100,00	93,95	97,21	95,11	73,19	59,97	66,33
BALI 2011	98,56	98,32	98,45	92,02	92,46	92,22	72,34	65,41	68,91
2010	98,73	98,65	98,69	91,37	86,90	89,26	67,33	63,01	65,22

Sumber : BPS, Susenas 2011.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun Provinsi Bali tahun 2011 mencapai 98,45 persen. Sebaran APS diseluruh kabupaten kota di Bali cenderung berkisar diatas angka APS Bali. APS Kota Denpasar tahun 2011 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2010 APS Kota Denpasar sebesar 99,15 persen menjadi 100 persen ditahun 2011, dari data tersebut dapat dikatakan bahwa semua penduduk Kota Denpasar pada usia 7-12 tahun sedang sekolah di bangku sekolah dasar. Dilihat dari sisi gender, terlihat hampir tidak

ada ketimpangan pada APS usia 7-12 tahun antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun Provinsi Bali di tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 92,22 persen dibandingkan tahun 2010 sebesar 89,26 Persen. Peningkatan ini didominasi oleh Kabupaten Karangasem. Dilihat dari data diatas Kabupaten Buleleng tercatat sebagai Kabupaten dengan APS usia 13-15 tahun terendah dibandingkan kabupaten kota yang lain. Angka APS usia 13-15 tahun terlihat lebih rendah dari APS penduduk 7-12 tahun, ini menandakan bahwa masih ada penduduk yang tamat sekolah dasar namun tidak meneruskan ke bangku SLTP, begitu juga dengan yang tamat SLTP akan tetapi tidak melanjutkan ke SLTA .

Dari sisi Gender, secara total terlihat hampir tidak terjadi ketimpangan gender pada APS usia 13-15 tahun di Provinsi Bali, namun ketika dilihat di masing-masing kabupaten/kota terlihat terjadi ketimpangan meskipun kecil, ketimpangan tersebut terjadi di tiga kabupaten diantaranya Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Bangli, dimana cenderung di dominasi jenis kelamin laki-laki dibanding perempuan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16-18 tahun Provinsi Bali di tahun 2011 mencapai 68,91 persen yang artinya dari seratus penduduk usia 16-18 tahun yang seharusnya bersekolah, ternyata masih ada sekitar 31 sampai 32 orang yang tidak bersekolah.

Dilihat dari sisi gender masih terjadi kesenjangan di beberapa kabupaten kota. Hal ini terlihat dari adanya selisih APS yang lumayan tinggi antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada lima kabupaten kota, diantaranya Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, dan Kota Denpasar.

4.1.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SLTP dan SLTA

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan batasan umurnya dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sesuai dengan kelompok umur pada jenjang/tingkat pendidikannya. Tidak berbeda dengan APS dan APM, analisis APK juga perlu dilakukan pada 3 (tiga) jenjang/tingkat pendidikan yaitu SD, SLTP, dan SLTA. APK pada masing-masing jenjang pendidikan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$APK \text{ SD} = \left[\frac{\text{Jumlah Penduduk Yang Bersekolah di SD}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun}} \right] \times 100$$

$$APK \text{ SLTP} = \left[\frac{\text{Jumlah Penduduk Yang Bersekolah di SLTP}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun}} \right] \times 100$$

$$APK \text{ SLTA} = \left[\frac{\text{Jumlah Penduduk Yang Bersekolah di SLTA}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16-18 tahun}} \right] \times 100$$

Dengan melakukan pengolahan data dari hasil pendataan Susenas 2011 dan menggunakan formulasi diatas diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3 : Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota Dan Kelompok Umur Di Provinsi Bali Tahun 2011.

Kabupaten/Kota	APK 7 - 12 th			APK 13 - 15 th			APK 16 - 18 th		
	L	P	T	L	P	T	L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)
1. Jembrana	103,72	95,04	99,26	78,02	95,18	85,31	93,46	76,43	84,26
2. Tabanan	91,32	92,55	91,88	108,60	105,45	106,94	85,83	77,33	81,50
3. Badung	102,85	101,30	102,03	101,09	95,76	98,41	84,67	94,86	89,17
4. Gianyar	100,05	103,00	101,42	95,01	99,92	97,27	93,10	99,25	96,45
5. Klungkung	100,18	107,91	103,29	92,05	85,11	88,64	97,10	110,67	103,49
6. Bangli	102,19	101,43	101,81	87,22	91,68	88,98	72,36	53,12	64,47
7. Karangasem	100,10	99,04	99,61	80,48	89,44	85,14	100,14	72,48	86,76
8. Buleleng	106,23	94,82	101,12	65,75	100,94	82,14	89,22	68,62	79,32
9. Denpasar	101,38	97,46	99,63	85,50	109,17	93,91	96,07	62,89	78,86
BALI 2011	101,28	98,45	99,95	85,99	98,53	91,71	90,64	77,91	84,33
2010	111,12	112,03	111,56	77,75	75,51	76,69	85,00	79,60	82,36

Sumber: BPS, Susenas 2011.

Tidak jauh berbeda dengan APS, Analisis APK menggambarkan anak yang bersekolah pada jenjang tertentu, dimana APK lebih menyoroti anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu tanpa memperhatikan usia. Dari hasil Susenas 2011, capaian APK SD di Provinsi Bali sebesar 99,95 persen. Ini menunjukkan bahwa ada sekitar 0,05 persen penduduk Bali yang semestinya bersekolah di sekolah dasar (SD) namun mereka belum/tidak sekolah atau mereka duduk pada jenjang yang lebih tinggi (SLTP). Apabila seluruh penduduk usia 7-12 tahun di Bali bersekolah di SD (sesuai jenjangnya) maka angka-angka APM, APS

dan APK SD di Bali akan mendekati 100 persen. Hal yang sama akan terjadi pada jenjang SLTP dan SLTA.

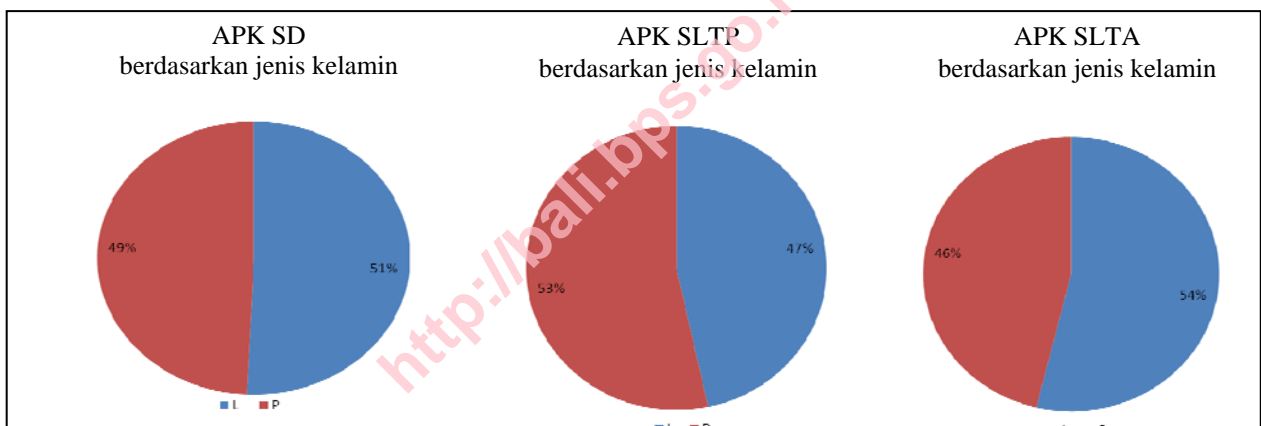
Melihat sebaran angka APK di masing-masing kabupaten/kota pada tabel di atas, Kota Denpasar yang memiliki angka paling ideal (99,63 persen), artinya dari semua Kabupaten/Kota di Bali, Kota Denpasar yang penduduk pada usia 7-12 tahun yang hanya 0,07% yang tidak sedang duduk dibangku sekolah dasar.

Memperhatikan angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan SLTP, angka APK di Bali meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 76,69 menjadi sebesar 91,71 persen ditahun 2011. Pada jenjang ini sebaran angka APK menunjukkan bahwa di masing-masing kabupaten/kota se-Bali masih terdapat 5 (lima) kabupaten/kota yang APK umur 13-15 tahun masih berada dibawah rata-rata APK Bali yaitu *Daerah Mekepong* (Kabupaten Jembrana), Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Buleleng. Keadaan yang sama juga terjadi pada jenjang pendidikan SLTA. Pada jenjang ini terdapat 5 kabupaten/kota yang angka APK-nya berada di bawah rata-rata Bali yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar.

Memperhatikan beberapa kondisi APK di atas, dapat diduga bahwa Kabupaten Buleleng dan Bangli merupakan dua kabupaten yang memiliki angka partisipasi sekolah berada di bawah rata-rata Bali pada tingkat SLTP dan SLTA. Keadaan ini cukup memberi petunjuk kepada semua pemangku kebijakan pendidikan di Bali dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian khusus pada kedua daerah tersebut.

Hasil kajian APK di atas, memperlihatkan kondisi sedikit berbeda dengan APS, dimana pada tingkat SD, angka partisipasi kasar perempuan lebih rendah dari angka partisipasi kasar laki-lakinya. Polanya kemudian berbalik pada tingkat SLTP dimana angka partisipasi kasar perempuannya menjadi lebih besar dibandingkan angka partisipasi kasar laki-laki, dan kembali angka partisipasi kasar perempuan lebih rendah dari angka partisipasi kasar laki-lakinya di jenjang SLTA. Pola APK tersebut disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 2 : APK Pendidikan SD, SLTP, dan SLTA, berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Bali Tahun 2011



Sumber : BPS, Susenas 2011.

4.1.4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SLTP, SLTA

Selain APS diatas masih ada lagi jenis Angka Partisipasi sekolah yang lain yaitu Angka Partisipasi Murni (APM). Yang merupakan terjemahan dari *Net Enrolment Ratio* (NER). Seperti halnya APS diatas, APM ini juga bisa digunakan untuk melakukan kajian di ketiga jenis/jenjang pendidikan yaitu

pada jenjang SD, SLTP dan SLTA. Untuk pengkajiannya di masing-masing jenjang pendidikan, digunakan formula sebagai berikut :

$$\text{APM SD} = \left[\frac{\text{Jumlah Murid SD (umur 7 - 12) Th.}}{\text{Jumlah Penduduk Usia (7 - 12) Th.}} \times 100 \right]$$

$$\text{APM SLTP} = \left[\frac{\text{Jumlah Murid SLTP (umur 13 - 15) Th.}}{\text{Jumlah Penduduk Usia (13 - 15) Th.}} \times 100 \right]$$

$$\text{APM SLTA} = \left[\frac{\text{Jumlah Murid SD (umur 16 - 18) Th.}}{\text{Jumlah Penduduk Usia (16 - 18) Th.}} \times 100 \right]$$

Tabel 4: Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SLTP, dan SLTA Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2011

Kabupaten/Kota	APM SD			APM SMP			APM SMA		
	L	P	T	L	P	T	L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)
1. Jembrana	93,43	89,34	91,33	66,10	61,12	63,99	51,45	45,96	48,48
2. Tabanan	83,31	82,31	82,85	62,03	72,73	67,65	52,46	54,01	53,25
3. Badung	90,92	89,63	90,24	74,73	67,68	71,18	67,84	58,45	63,69
4. Gianyar	92,71	90,49	91,68	71,55	77,61	74,34	67,57	83,26	76,12
5. Klungkung	95,44	88,92	92,82	72,57	63,03	67,88	71,38	68,45	70,00
6. Bangli	90,78	93,92	92,34	70,91	78,67	73,97	58,22	39,16	50,41
7. Karangasem	89,04	87,65	88,40	64,88	71,94	68,55	69,19	42,91	56,48
8. Buleleng	95,04	88,12	91,94	55,96	76,50	65,53	63,24	57,28	60,37
9. Denpasar	92,33	90,90	91,69	66,19	77,60	70,24	64,21	50,67	57,19
BALI 2011	91,57	89,06	90,39	65,99	72,94	69,16	63,56	57,47	60,54
2010	96,23	94,79	95,53	69,54	65,93	67,83	59,46	54,72	57,14

Sumber : BPS, Susenas 2011.

Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar di Bali tahun 2011 baru mencapai rata-rata 90,39 persen sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya 95,53 persen. Dengan APM sebesar 90,39 persen, berarti bahwa dari 100 murid yang berusia 7-12 tahun, 95 orang diantaranya yang sedang aktif mengikuti pendidikan SD. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwan masih terdapat 2 kabupaten yang APM nya masih berada di bawah rata-rata Bali yaitu Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Karangasem. Sementara angka tertinggi dicapai oleh Kabupaten Klungkung sebesar 92.82 persen. Secara umum APM antara penduduk laki dan perempuan pada tingkat SD di Bali masih menunjukkan sedikit perbedaan, dimana APM laki-laki 91,57 persen sedikit berada di atas APM perempuan 89,06 persen.

Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP, di Bali tahun 2011 tercatat sebesar 69,16 persen, meningkat sebesar 1,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tercatat 67,83 persen. Perbedaan antara angka APM Laki-laki dengan angka APM perempuan juga terlihat pada APM SLTP, Ini berarti bahwa partisipasi penduduk perempuan yang bersekolah di SLTP semakin mendominasi penduduk laki-laki. Dominasi perempuan yang paling mencolok terjadi di Kabupaten Buleleng.

Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, terlihat pada Tabel diatas, dimana APM laki-laki menunjukkan angka berbeda juga dengan APM perempuan. APM laki-laki mencapai angka 63,56 persen. Sedangkan APM perempuannya baru mencapai 57,47 persen. Angka APM tertinggi di Bali masih sama seperti tahun kemarin diduduki oleh Kabupaten Gianyar sebesar 76,12 persen dan terendah ada di Kabupaten Jembrana sebesar 48,48 persen. Dilihat dari

perbedaan gender, APM SLTA perempuan masih berada di bawah rata-rata Bali. Dari angka APM yang ada di masing-masing kabupaten/kota, terlihat hampir semua kabupaten/kota yang telah mampu mendorong lima puluh persen lebih kaum perempuannya untuk mengenyam pendidikan hingga ke jenjang SLTA, namun masih ada tiga kabupaten yang belum mampu melaksanakan hal itu, adapun ketiga kabupaten tersebut adalah Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem

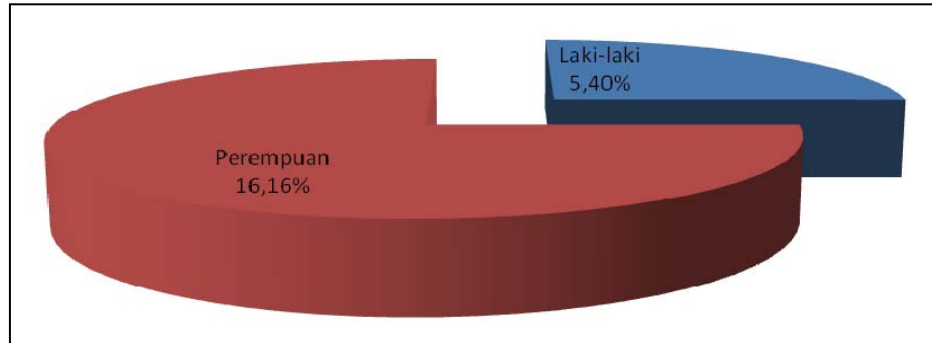
4.2. ANGKA BUTA HURUF.

Indonesia telah ikut serta menandatangani MDGs (*Milenium Development Goals*) yang di luncurkan oleh *United Nation* (PBB), bahwa pada tahun 2015 diharapkan buta aksara di kalangan marginal telah dapat dikurangi minimal menjadi 50 persen. Sebagai bagian dari dunia global, sudah tentu Bali juga wajib mencapai target tersebut. Pada tingkat makro, ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah tingkat melek huruf yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis. Dalam hal ini angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. AMH dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, dan dengan kemampuan baca tulis seseorang dapat mempelajari dan menyerap ilmu pengetahuan. Hal ini mengandung arti bahwa melek huruf merupakan indikator paling dasar dalam masalah pendidikan di suatu daerah.

Angka melek huruf berbanding terbalik dengan angka buta huruf, yaitu persentase penduduk 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis baik huruf latin dan atau huruf lainnya, semakin tinggi angka melek huruf suatu wilayah berarti angka buta hurufnya akan semakin rendah. Tahun 2011 tercatat penduduk Bali yang berusia 15 tahun ke atas dan telah memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis mencapai 89,17 persen, sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 sebesar 88,40 persen. Dengan kata lain, kedepan Pemerintah Provinsi Bali mempunyai kewajiban untuk menuntaskan buta aksara pada penduduk usia 15 tahun ke atas sekitar 10,83 persen.

Salah satu usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis penduduk adalah melalui program kejar paket A, paket B dan program keaksaraan fungsional. Melalui program ini diharapkan penduduk yang tidak pernah sekolah mampu membaca dan menulis hurup latin termasuk juga mampu berbahasa indonesia. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk memperoleh tambahan pengetahuan melalui media cetak dan elektronik. Dari data Susenas 2011 terlihat bahwa 10,83 persen penduduk 15 tahun ke atas di Bali masih buta huruf, turun dari tahun 2010 sebesar 11,60 persen. Gambar 6 menyajikan potret penduduk usia 15 tahun ke atas di Bali yang buta huruf menurut jenis kelamin :

Gambar 3 : Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas Yang Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2011



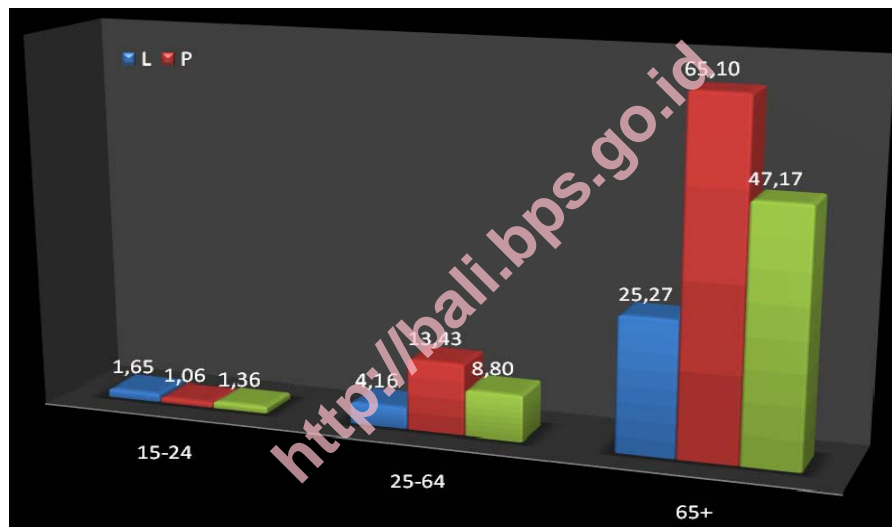
Sumber : BPS, Susenas 2011.

Bila dilihat menurut gender, buta huruf kaum perempuan lebih tinggi dari kaum lelaki. Angka buta huruf perempuan sebesar 16.61 persen sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 16,21 persen. Angka buta huruf perempuan berada jauh di atas laki-laki yang mencapai 5,40 persen menurun dari tahun sebelumnya sebesar 6,99 persen. Keadaan ini perlu diwaspadai dan menjadi kajian serius untuk kemudian secara tegas harus diimplementasikan dalam kegiatan pengarusutamaan gender (PUG) di Bali. Upaya pemberantasan buta huruf melalui kursus/pelatihan keaksaraan fungsional atau program kejar paket A, paket B yang mengarah kepada tujuan penuntasan buta aksara mesti tetap dilanjutkan sehingga upaya mewujudkan komitmen MDG'S dapat terwujud tuntas di tahun 2015.

Guna memperjelas kajian di atas, perlu dilakukan kajian yang spesifik mengarah pada angka buta huruf menurut kelompok umur. Dengan mengetahui spesifikasi angka buta huruf di masing-masing kelompok umur diharapkan

kebijakan program pembangunan khususnya dalam pemberantasan buta huruf dapat diarahkan pada sasaran yang lebih efektif dan terarah. Gambar dibawah ini menyajikan Angka Buta Aksara menurut kelompok remaja (15-24 tahun), kelompok dewasa (25-64 tahun) dan kelompok lansia (65 tahun ke atas), di Provinsi Bali tahun 2011 sebagai berikut :

Gambar 4 : Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur, Provinsi Bali Tahun 2011



Sumber : BPS, Susenas 2011.

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran buta aksara pada penduduk 15 tahun ke atas sebagian besar berada pada kelompok umur 65 tahun keatas atau pada kelompok lansia sebesar 47,17 persen dari 51,45 persen di tahun 2010, sisanya masing-masing tersebar pada kelompok umur 25-64 tahun atau kelompok dewasa sebesar 8,80 persen dari 9,20 persen ditahun 2010 dan sebesar 1,36 persen dari 0,62 persen pada kelompok umur 15-24 tahun atau kelompok remaja. Dilihat sisi

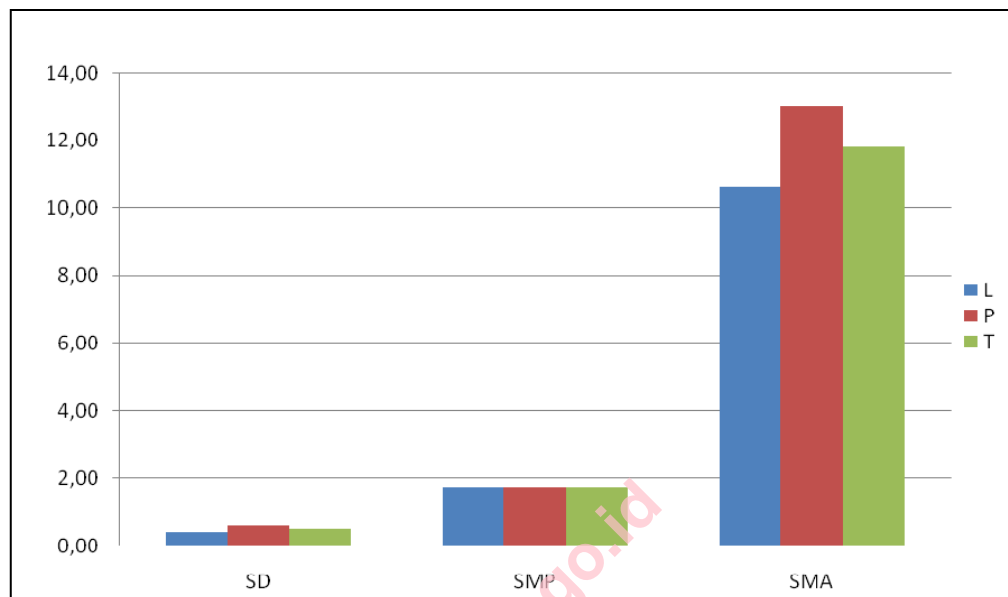
gender, penduduk buta aksara kebanyakan terjadi pada kelompok perempuan seperti yang ditampilkan pada kelompok umur lansia, dimana meski sudah mengalami penurunan dari tahun kemarin, namun angka buta huruf pada perempuan usia tersebut masih tergolong sangat tinggi.

4.3. ANGKA ANAK PUTUS SEKOLAH.

Angka putus sekolah yang mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Penyebab putus sekolah antara lain karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, keadaan geografis yang kurang menguntungkan, kondisi ekonomi orang tua yang miskin. Kemiskinan seringkali menjadi alasan bagi siswa sekolah untuk tidak melanjutkan sekolah, karena mereka diharapkan membantu mencari nafkah untuk keluarganya, dan anggapan lebih baik bekerja dengan mendapatkan uang, disamping anggapan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar biaya yang diperlukan, sementara masyarakat miskin dan rumahtangga miskin tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk biaya pendidikan. Hal ini dapat saja merubah corak permasalahan pekerja anak suatu daerah. Angka putus sekolah dapat digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur, serta sekaligus gambaran kemampuan ekonomi orangtua.

Pada bahasan ini perkiraan jumlah putus sekolah menggunakan pendekatan kelompok penduduk berumur 7-18 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi termasuk penduduk yang tamat SD, SLTP dan SLTA, tapi tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Karena usia ini merupakan usia yang ideal untuk menyelesaikan pendidikannya.

Gambar 5 : Persentase Penduduk Putus Sekolah, Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Bali, Tahun 2011



Sumber: BPS, Susenas 2011

Dari grafik diatas dapat dikatakan bahwa penduduk yang putus sekolah kebanyakan pada anak jenjang pendidikan SLTA, hal ini terjadi karena dimasyarakat ada pemahaman dengan pendidikan SLTP saja sudah cukup dan sudah layak bekerja, disamping itu kemungkinan juga karena faktor ekonomi keluarga yang tidak bisa menyekolahkan karena biaya pendidikan usia SLTA cukup tinggi.

Dilihat dari sisi gender, pada grafik diatas terlihat bahwa pada jenjang pendidikan SD kebanyakan yang putus sekolah pada jenis kelamin perempuan, pada SLTP terlihat yang putus sekolah merata pada jenis kelamin perempuan dan laki-laki, sedangkan pada jenjang pendidikan SLTA jenis kelamin perempuan mendominasi angka putus sekolah. Dari grafik diatas perlu ditelaah lebih dalam lagi mengenai disparitas gender yang terjadi.

4.4. PENDUDUK TIDAK BERSEKOLAH

Sebagaimana tersirat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, Indonesia mempunyai cita-cita luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita luhur ini diimplementasikan kedalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan, dengan melaksanakan berbagai program kearah tersebut. Salah satu upaya yang kini sedang dilakukan adalah dengan melaksanakan program pembangunan pendidikan untuk semua (*Education for All/EFA*). Program EFA diarahkan pada upaya-upaya memberikan pendidikan secara terus menerus kepada semua penduduk usia 7 hingga 18 tahun sehingga diharapkan tidak ada penduduk di usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah.

Dari hasil susenas 2011 tercatat masih ada penduduk berusia 7-18 tahun yang tidak bersekolah sekitar 9,02 persen menurun dari tahun sebelumnya sebesar 10,94 persen, dan kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Tabel dibawah memperlihatkan bahwa perempuan usia 7-18 tahun masih ada yang tidak bersekolah sekitar 10,04 persen menurun dari tahun sebelumnya sebesar 12,07 persen. Pada usia yang sama laki-laki pada yang tidak bersekolah tercatat sebesar 8,11 persen, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 9,89 persen.

Dilihat dari sebaran wilayahnya tergambar bahwa daerah pedesaan masih lebih tinggi penduduk yang tidak bersekolah lagi dibandingkan daerah perkotaan, dari tabel diatas terlihat didaerah pedesaan persentase penduduk yang tidak pernah/belum sekolah dan tidak bersekolah lagi tercatat sebesar 11,11 persen dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 10,05 persen dan perempuan sebesar 12,33 persen. Di perkotaan tercatat sedikit lebih rendah dibanding kan yang di pedesaan

yaitu sebesar 7,62 persen dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 6,78 persen dan perempuan sebanyak 8,54 persen.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Provinsi Bali Tahun 2011

Partisipasi Sekolah	Pedesaan			Perkotaan			Perkotaan Perdesaan			+
	L	P	T	L	P	T	L	P	T	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1. Tidak/Belum pernah sekolah	1,42	1,46	1,44	0,43	0,42	0,43	0,84	0,83	0,83	
2. Masih sekolah	89,95	87,67	88,89	93,22	91,46	92,38	91,89	89,96	90,98	
3. Tidak bersekolah Lagi	8,63	10,87	9,67	6,35	8,12	7,19	7,28	9,21	8,19	
4. Jumlah 1 dan 3	10,05	12,33	11,11	6,78	8,54	7,62	8,11	10,04	9,02	

Sumber : BPS, Susenas 2011.

Ada beberapa alasan yang diduga sebagai penyebab tidak dapat atau belum memperoleh kesempatan pendidikan diantaranya adalah karena tidak ada biaya, mencari nafkah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, mengurus rumah tangga/menikah, lokasi sekolah jauh, atau alasan lain yang menyebabkan mereka tidak bisa memperoleh/ melanjutkan pendidikan. Berikut beberapa alasan penduduk yang tidak bersekolah:

Tabel 6. Persentase penduduk 7-18 Tahun Menurut Alasan Tidak Ber-sekolah dan Jenis Kelamin di Provinsi Bali Tahun 2011

Alasan tdk/blm pernah sekolah/tdk bersekolah lagi	Jenis Kelamin		
	Laki	Prp	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tidak ada biaya	52,96	56,68	54,91
2. Bekerja/mencari nafkah	8,47	15,17	11,98
3. Menikah/mengurus rt	0,60	7,74	4,34
4. Merasa pendidikan cukup	2,38	3,74	3,09
5. Malu karena ekonomi	0,82	0,46	0,63
6. Sekolah jauh	5,07	1,88	3,40
7. Cacat	5,39	4,02	4,67
8. Menunggu pengumuman	2,13	2,11	2,12
9. Tidak diterima	0,00	0,94	0,49
10. Lainnya	22,19	7,28	14,37
Jumlah Bali	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2011

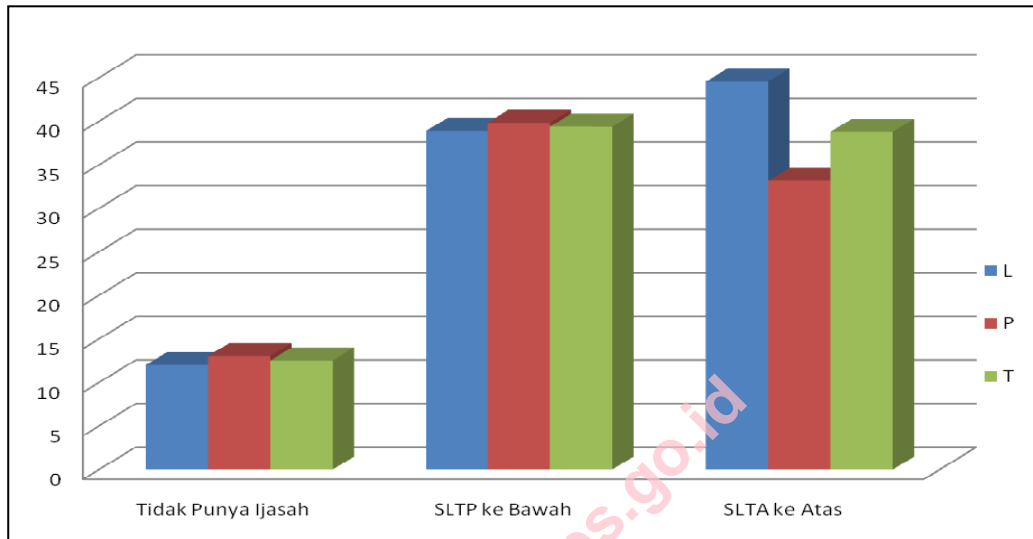
Dari 10 kelompok alasan responden dapat mengenyam pendidikan seperti yang ditabelkan diatas, terlihat bahwa alasan tidak ada biaya merupakan alasan dengan persentase tertinggi sebesar 54,91 persen, dilihat dari sudut pandang gender dapat dikatakan persentase penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih besar dengan penyebab tidak ada biaya dibandingkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki. Bekerja/mencari nafkah menjadi urutan kedua jawaban terbanyak setelah jawaban tidak ada biaya, terlihat pada jenis kelamin perempuan persentasenya hampir dua kali laki-laki, dari data diatas dapat dikatakan bahwa kecendrungan anak perempuan disuruh berhenti sekolah untuk mencari nafkah.

4.5. TINGKAT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN.

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk dapat menjadi salah satu indikator dari tingkat kemampuan SDM. Tahun 2011 tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk di Propinsi Bali mengalami peningkatan yang dicirikan dengan berkurangnya persentase penduduk yang berpendidikan rendah dan sebaliknya persentase penduduk yang berpendidikan tinggi meningkat. Persentase penduduk dengan tingkat pendidikan tertinggi yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD, mengalami penurunan. Sedangkan penduduk dengan tingkat pendidikan tamat SD, SLTP, SLTA, dan tamat akademi/perguruan tinggi, persentasenya mengalami peningkatan

Dari sudut pandang gender, perlu diperhatikan bahwa masih ada tendensi diskriminatif terhadap kesempatan pendidikan bagi kaum perempuan. Ketimpangan pemerataan tingkat pendidikan yang ditamatkan perempuan hanya unggul pada tingkat pendidikan SLTP ke bawah saja. Ditingkat SLTA ke atas tingkat pendidikan kaum perempuan berada di bawah laki-laki. Pola semacam ini terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 6 : Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan dan jenis kelamin, Provinsi Bali Tahun 2011.



Sumber : BPS, Susenas 2011

Pada grafik diatas terlihat bahwa penduduk 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu tidak punya ijazah, SLTP ke bawah, dan SLTA ke atas. Dilihat dari sisi gender penduduk laki-laki pada kelompok SLTA ke atas lebih tinggi dari yang perempuan, namun pada SLTP ke bawah malah sebaliknya yaitu penduduk perempuan lebih tinggi persentasenya dari penduduk laki-laki meskipun tidak terlalu jauh.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari hasil kajian data susenas 2011 di atas, dan hasil analisis dengan menggunakan beberapa indikator pendidikan yang ada, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting untuk menjadi bahan evaluasi pembangunan di bidang pendidikan khususnya di Provinsi Bali :

1. Partisipasi sekolah anak usia dini (0-6 tahun) baru mencapai 19,25 persen. Mengingat betapa pentingnya upaya peningkatan kualitas manusia sejak usia dini, maka program ini perlu dipacu khususnya bagi Kabupaten Jembrana, Karangasem, Buleleng dan Bangli dimana capaian angka partisipasinya masih berada dibawah rata-rata Bali.
2. Angka partisipasi PAUDNI di daerah perdesaaan, khususnya partisipasi prasekolah penduduk usia 4-6 tahun perlu lebih dipacu dengan memperbanyak akses TK/RB perdesaan untuk mengimbangi pesatnya kemajuan partisipasi PAUDNI di perkotaan. Angka Partisipasi PAUDNI usia 4-6 tahun di Provinsi Bali tahun 2011 sebesar 43,20 persen.

3. Dari hasil perhitungan angka partisipasi sekolah baik APS maupun APM di ketiga jenjang pendidikan, (SD, SLTP, dan SLTA) Provinsi Bali, ada tendensi bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, makin kecil angka partisipasinya. Semakin rendahnya angka partisipasi tersebut lebih banyak disebabkan oleh menurunnya partisipasi sekolah dari penduduk perempuan. Diduga masih ada diskriminasi gender, dimana laki-laki masih dipandang sebagai figur utama pada program pendidikan 7 hingga 18 tahun.
4. Hingga tahun 2011 di Bali masih terdapat 10,83 persen penduduk usia 15 tahun keatas yang belum melek huruf. Sebaran penduduk buta huruf di Bali sebagian besar ada di Kabupaten Karangasem, Klungkung dan Bangli. Kebanyakan (47,17 persen) ada di kelompok lansia. Sementara di kelompok dewasa tercatat sebesar 8,80 persen, dan sisanya (1,36 persen) ada di kelompok remaja.
5. Angka Anak Putus sekolah di Bali masih terjadi di semua jenjang pendidikan. Angka anak putus sekolah di Bali memiliki pola semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan/kelompok usia sekolah. Angka putus sekolah di jenjang SD/ sederajat tercatat sebesar 0,48 persen, selanjutnya angka tersebut meningkat di kelompok tingkat SLTP/ sederajat sebesar 1,72 persen. Sedangkan di tingkat SLTA/ sederajat terus meningkat menjadi 11,83 persen.
6. Di Bali masih ada sekitar 10,94 persen dari penduduk berusia 7-18 tahun yang tidak bersekolah dan kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Ada tiga alasan utama yang dikemukakan oleh penduduk usia 7-18 tahun sehingga menyebabkan mereka tidak bersekolah. Sebesar 54,91 persen alasan yang

dikemukakan adalah karena tidak ada biaya. Alasan ini paling banyak dikemukakan oleh penduduk baik di laki-laki maupun perempuan.

7. Secara normatif kualitas penduduk di Bali relatif baik jika penduduk umur 15 tahun ke atas yang berpendidikan minimal tamat SLTP mendekati 100 persen. Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang berpendidikan minimal tamat SLTP masih kurang dari separuhnya (hanya 39,38 persen). Hal ini perlu di waspadai karena secara normatif penduduk umur 15 tahun ke atas sudah harus mencapai 100 persen seiring dengan program pembangunan pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun yang telah dilaksanakan lebih dari 15 tahun yang lalu.

<http://bali.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://bali.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
Jl. Raya Puputan No. 1 Renon Denpasar 80226
Telp. (0361) 238159, Fax. (0361) 238162
Homepage: <http://bali.bps.go.id>
E-mail: bps5100@bps.go.id